

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang. (n.d.). *Profil KPPN Palembang*. Diakses tanggal 1 Februari 2022 dari <http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/profil/profil-kppn-palembang/standar-pelayanan-minimum.html>

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. (n.d.). *Mekanisme Pencairan APBN dan Syarat Administrasi Pembebanan*. Diakses tanggal 8 Desember 2021 dari <https://adoc.pub/mechanisme-pencairan-apbn-dan-syarat-administrasi-pembebanan.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.